

Pemberdayaan Pengrajin Kain Tenun Buton Sebagai Sumber Pendapatan Masyarakat Di Desa Karae Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan

Wa Ode Nilam Rusliani^{1*}, Mirna¹

¹ Ilmu Administrasi Negara, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

e-mail: nilamrusliani@gmail.com

* Corresponding Author

Received: 25 November 2025

Revised: 20 Desember 2025

Accepted: 31 Desember 2025

Abstrak

Pemberdayaan pengrajin tenun di Desa Karae masih menghadapi kendala, antara lain lingkungan pendukung yang terbatas, kapasitas pengrajin dalam manajemen dan pemasaran yang rendah, serta ketiadaan perlindungan hukum terhadap produk lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat pemberdayaan pengrajin tenun dan merumuskan strategi peningkatan keberlanjutan usaha tenun. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek enabling, empowering, dan protecting belum berjalan secara sinergis, sehingga pengembangan usaha tenun dan daya saing produknya terhambat. Rekomendasi penelitian mencakup penguatan lingkungan produksi melalui penyediaan fasilitas dan infrastruktur, peningkatan kapasitas pengrajin melalui pelatihan manajemen, inovasi desain, pemasaran digital, serta akses permodalan, dan perlindungan hukum terhadap produk tenun lokal melalui pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan kebijakan afirmatif. Implementasi strategi ini diharapkan dapat meningkatkan keberlanjutan industri tenun, memperkuat daya saing produk lokal, dan mendukung kesejahteraan pengrajin.

Kata kunci: Pemberdayaan, Perlindungan, Memungkinkan

Abstract

The empowerment of weaving artisans in Karae Village still faces obstacles, including a limited supportive environment, low capacity of artisans in management and marketing, and the absence of legal protection for local products. This study aims to analyze the factors that inhibit the empowerment of weaving craftsmen and formulate strategies to improve the sustainability of the weaving business. The research method used is a qualitative descriptive approach with data collection through in-depth interviews, field observations, and documentation studies. The results of the study show that the aspects of enabling, empowering, and protecting have not run synergistically, so that the development of the weaving business and the competitiveness of its products are hampered. Research recommendations include strengthening the production environment through the provision of facilities and infrastructure, capacity building of artisans through management training, design innovation, digital marketing, and access to capital, and legal protection of local woven products through the registration of Intellectual Property Rights (IPR) and affirmative policies. The implementation of this strategy is expected to increase the sustainability of the weaving industry, strengthen the competitiveness of local products, and support the welfare of artisans.

Keywords: Empowerment, Protection, Enabling

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat sebagai suatu pemikiran yang tidak dapat dilepaskan dari paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat. Setiap upaya pemberdayaan harus diarahkan pada penciptaan suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kehidupan yang jauh lebih baik.

Pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya. Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yaitu kerajinan kain tenun. Salah satu kain tenun khas Indonesia ialah kain tenun Buton. Secara umum kain tenun masyarakat Buton sudah dikenal dan digunakan oleh berbagai kalangan untuk menunjukkan identitas kelompok atau berdasarkan stratifikasi sosial. Oleh sebab itu, tenun baik dari segi teknik produksi desain dan produk yang dihasilkan harus dijaga dan dilestarikan keberadaannya ditengah-tengah Masyarakat.

Kain tenun Buton merupakan salah satu warisan budaya yang memiliki nilai historis dan ekonomi penting bagi masyarakat Sulawesi Tenggara khususnya di Kabupaten Buton Selatan. Kain ini tidak hanya menjadi simbol identitas budaya tetapi juga berperan sebagai sumber pendapatan bagi pengrajin lokal. Di Desa Karae Kecamatan Siompu tradisi menenun kain tenun masih dilestarikan oleh masyarakat sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari dan kegiatan ekonomi mereka. Namun, meskipun memiliki potensi besar pengrajin kain tenun di Desa Karae Kecamatan Siompu masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan modal akses pasar yang sempit dan minimnya inovasi produk.

Di Desa Karae Kecamatan Siompu tradisi menenun kain tenun masih dilestarikan oleh masyarakat sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari dan sumber pendapatan utama. Proses pembuatan kain tenun di daerah ini masih menggunakan teknik tradisional yang diwariskan secara turun-temurun mulai dari pemintalan benang kapas hingga proses menenun dengan alat tenun bukan mesin (ATBM).

Namun demikian, pemberdayaan pengrajin kain tenun di Desa Karae masih menghadapi sejumlah kendala yang signifikan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan modal usaha yang menghambat pengrajin dalam mengembangkan produksi dan inovasi produk. Selain itu akses pasar yang masih terbatas membuat hasil tenun sulit untuk dipasarkan ke wilayah yang lebih luas sehingga pendapatan pengrajin menjadi kurang optimal. Hal ini berpotensi mengancam kelestarian budaya tenun Buton itu sendiri jika tidak ada upaya serius untuk membangkitkan kembali minat dan keterampilan menenun di kalangan generasi penerus. Oleh karena itu, pemberdayaan pengrajin harus mencakup aspek pelestarian budaya sekaligus peningkatan kesejahteraan ekonomi. Putridiani & Suryono (2019). Selain itu perlu sinergi antara pemerintah komunitas pengrajin dan sektor swasta dapat menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan kerajinan tenun, sekaligus menjaga kelestarian budaya lokal. Hisyam (2021).

Dengan pemberdayaan yang tepat, kain tenun Buton tidak hanya akan menjadi simbol budaya yang dilestarikan tetapi juga menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat Desa Karae. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pengrajin dan masyarakat secara umum, serta memperkuat identitas budaya yang menjadi kebanggaan daerah. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai pemberdayaan pengrajin kain tenun Buton sangat penting untuk merumuskan strategi yang efektif dan berkelanjutan. Bagaimanakah Pemberdayaan Pengrajin Kain Tenun Buton Sebagai Sumber Pendapatan Masyarakat di Desa Karae Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Secara umum, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai proses yang membantu individu dan komunitas memperoleh kontrol atas kehidupan mereka, termasuk akses terhadap sumber daya, kesempatan, dan kemampuan untuk mengambil keputusan. (Zimmerman, 2000) mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses multidimensi yang melibatkan peningkatan kontrol, kompetensi, dan rasa memiliki terhadap situasi sosial. Dalam konteks ini, pemberdayaan tidak hanya bersifat individual tetapi juga kolektif, karena ia menghubungkan kapasitas pribadi dengan aksi sosial komunitas.

(Chambers, 2014), salah satu tokoh penting dalam *people-centered development*, menggarisbawahi pentingnya *reversal learning*, yaitu membalik paradigma pembangunan dari yang berpusat pada pemerintah atau ahli menjadi berpusat pada masyarakat lokal. Menurutnya, pemberdayaan memerlukan ruang bagi masyarakat untuk menentukan

kebutuhannya sendiri, mengambil keputusan, serta berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Kemudian (Ife, 2013) juga memberikan kontribusi penting melalui pendekatan *community development* yang menekankan keadilan sosial, keberlanjutan, dan penghargaan terhadap nilai budaya lokal. Ia menyatakan bahwa pemberdayaan harus diorientasikan pada peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu memengaruhi struktur sosial yang selama ini mengekang mereka.

Menurut (Mardikanto, 2012), pemberdayaan masyarakat mencakup tiga pendekatan utama, yaitu *enabling*, *empowering*, dan *protecting*. *Enabling* berarti menciptakan iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang; *empowering* merujuk pada peningkatan kapasitas dan keterampilan; sementara *protecting* menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan agar tidak tertindas oleh sistem sosial atau ekonomi. Ketiga pendekatan ini saling terkait dan harus diterapkan secara simultan agar pemberdayaan berjalan efektif.

Pemberdayaan masyarakat harus berakar pada modal sosial-kultural lokal nilai, pengetahuan tradisional, dan struktur kelembagaan informal karena tanpa pengakuan terhadap modal tersebut, intervensi teknis cenderung tidak berkelanjutan.” (Didi, 2018). Lebih lanjut dikatakan bahwa “Proses pemberdayaan efektif apabila dimulai dari *enabling* (membangkitkan kesadaran dan kapasitas dasar) lalu dilanjutkan dengan *strengthening* organisasi kolektif, akses pasar, dan tata kelola yang akuntabel.” (Didi La, 2022).

Dalam praktiknya, pemberdayaan sering kali mencakup pendidikan masyarakat, pengembangan kapasitas, penguatan kelembagaan lokal, hingga fasilitasi perencanaan partisipatif. Proses ini menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Ketika masyarakat memahami persoalan, memiliki kapasitas untuk merumuskan solusi, dan mempunyai akses terhadap sumber daya, maka perubahan sosial menjadi lebih berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan dan memahami secara mendalam proses pemberdayaan yang terjadi dalam kehidupan para pengrajin kain tenun Buton di Desa Karae. Penelitian ini bertujuan untuk menggali makna, memahami proses sosial, serta mendeskripsikan bagaimana aktivitas pemberdayaan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Menurut Bogdan dan Taylor (2015), metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sementara Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan dengan menekankan pada aspek makna, proses, dan konteks.

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Karae, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan. Desa ini dikenal sebagai salah satu wilayah pengrajin kain tenun khas Buton yang masih mempertahankan aktivitas tenun sebagai bagian dari tradisi sekaligus mata pencaharian masyarakat. Penelitian ini tidak hanya mengkaji proses pemberdayaan, tetapi juga bagaimana kegiatan tersebut memberikan kontribusi terhadap pendapatan rumah tangga para pengrajin.

Pengumpulan data merupakan tahapan penting dalam penelitian kualitatif, karena data yang diperoleh akan menjadi dasar utama dalam melakukan analisis dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik utama untuk mengumpulkan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan sejak data mulai dikumpulkan hingga laporan akhir disusun. Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model Miles dan Huberman dalam Saleh (2017), yaitu Pengumpulan data, Reduksi Data, Penyajian data & penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pemberdayaan pengrajin kain tenun di Desa Karae masih berada dalam tahap awal dan belum terstruktur secara sistematis. Meskipun terdapat potensi budaya dan ekonomi yang kuat, dukungan kelembagaan, akses pasar, dan pendampingan masih sangat dibutuhkan.

Jika pemberdayaan dilakukan dengan memperhatikan aspek *enabling* (penyediaan lingkungan yang mendukung), *empowering* (penguatan kapasitas dan keterampilan), dan *protecting* (perlindungan dari persaingan tidak sehat), maka pengrajin tenun Buton akan

memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan dan mempertahankan warisan budaya.

Pada aspek *enabling*

Enabling dalam pemberdayaan masyarakat berarti menciptakan kondisi yang membuat masyarakat mampu berkembang dan mengambil peran dalam memajukan diri mereka sendiri. Ini dilakukan dengan membuka akses terhadap informasi, pelatihan, kesempatan, serta dukungan yang mereka butuhkan, sehingga hambatan-hambatan yang menghalangi potensi mereka dapat diminimalkan. Melalui proses ini, masyarakat tidak hanya dibantu, tetapi difasilitasi untuk menemukan kekuatan, kemampuan, dan solusi mereka sendiri, hingga akhirnya mampu berdiri mandiri dan berdaya dalam mengelola kehidupannya.

Masyarakat seharusnya difasilitasi dengan berbagai sarana pendukung seperti balai pelatihan, tempat produksi bersama, koperasi pengrajin, serta adanya regenerasi untuk melestarikan tradisi. Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan hadir untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan potensi lokal. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa di Desa Karae kegiatan menenun masih dilakukan secara individu di rumah masing-masing dengan alat tenun bukan mesin (ATBM) milik pribadi. Tidak ditemukan fasilitas umum, koperasi, maupun intervensi kelembagaan dari pemerintah. Selain itu, regenerasi pengrajin menjadi tantangan karena generasi muda lebih memilih merantau dan kurang tertarik melanjutkan tradisi menenun yang dianggap kurang menjanjikan dari segi ekonomi.

Penelitian ini menunjukana bahwa di Desa Karae, upaya *enabling* masyarakat dalam menenun belum terealisasi. Kegiatan menenun masih dilakukan secara individu di rumah dengan alat pribadi, tanpa fasilitas umum, koperasi, atau pendampingan pemerintah yang dapat memfasilitasi pengembangan potensi lokal. Padahal, keberadaan balai pelatihan, tempat produksi bersama, dan program regenerasi pengrajin seharusnya membantu masyarakat agar lebih mandiri dan berdaya. Kondisi ini diperparah oleh generasi muda yang kurang tertarik melanjutkan tradisi menenun karena dianggap kurang menjanjikan secara ekonomi, sehingga peluang pemberdayaan melalui *enabling* menjadi terbatas.

Berikut adalah tabel jumlah pengrajin kain tenun di Desa Karae berdasarkan

Jenis dan Motif Tenun	Harga sarung perempuan	Harga sarung laki - laki
Sarung Rante	350	-
Sarung Katamba Gawu	280	300
Sarung Banca	280	300
Sarung Katamba Ijo	280	300
Sarung Hitam Putih	280	300
Sarung Kumbaea	280	300
Sarung Boka	350	380
Sarung tempelan motif	700	700

Matriks diatas menunjukan konteks *enabling* di Desa Karae, bahwa data harga dan jenis motif tenun menunjukkan produk tenunan yang cukup beragam, mulai dari sarung Rante yang dijual seharga Rp350.000 untuk perempuan, hingga sarung tempelan motif seharga Rp700.000 untuk perempuan maupun laki-laki. Sarung lain seperti Katamba Gawu, Banca, Katamba Ijo, Hitam Putih, Kumbaea, dan Boka memiliki harga bervariasi antara Rp280.000 hingga Rp380.000, tergantung jenis dan target pengguna. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi ekonomi yang nyata dari kerajinan tenun, yang seharusnya dapat dimanfaatkan melalui fasilitas pendukung seperti balai pelatihan, tempat produksi bersama, dan koperasi. Dengan adanya dukungan tersebut, masyarakat tidak hanya mampu mempertahankan tradisi menenun, tetapi juga meningkatkan kapasitas produksi dan pemasaran sehingga potensi ekonomi dari motif dan jenis sarung yang beragam dapat lebih optimal dimanfaatkan. Tanpa *enabling* yang memadai, peluang ini tetap terbatas karena kegiatan menenun masih bersifat individu dan skala kecil.

Menilik hasil penelitian di Desa Karae yang menunjukkan bahwa proses tenun masih bersifat individual, kurang adanya fasilitas bersama, kelembagaan maupun regenerasi, hal ini sejalan dengan argumen bahwa institusi kolektif seperti koperasi sangat krusial dalam pemberdayaan kerajinan tradisional. Sebagaimana temuan (Muhtadi, 2021) bahwa program ekonomi kreatif berbasis koperasi melalui pelatihan dan pendampingan berhasil meningkatkan pendapatan serta kemandirian ekonomi masyarakat desa. Demikian pula, studi pada komunitas kerajinan di Sawahlunto menunjukkan bahwa modal sosial (social

capital) menjadi pendorong kolaborasi, memperluas jaringan pemasaran, dan memperkuat ikatan kolektif di antara perajin yang secara langsung mendukung keberlanjutan usaha kreatif (Jannah et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa telah tersedia, data harga dan variasi motif sarung di Desa Karae yang berarti ada potensi ekonomi yang dibutuhkan sekarang adalah struktur kolektif agar potensi tersebut bisa dikembangkan secara optimal.

Lebih lanjut, kajian empiris pada komunitas pedesaan di Tiongkok oleh (Yue et al., 2023) menunjukkan bahwa intervensi pemberdayaan melalui pelatihan, partisipasi kolektif, dan pembentukan ekonomi bersama memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kolektif desa, peningkatan aset bersama, dan stabilitas ekonomi komunitas. Hal ini mendukung gagasan bahwa tanpa kelembagaan pendukung, seperti koperasi, akses pasar, maupun pelatihan, usaha tenun tradisional di Desa Karae berpotensi stagnan meskipun memiliki produk yang bernilai. Oleh karena itu, temuan Anda memperkuat teori bahwa enabling melalui struktur kolektif dan fasilitas bersama bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan strategis agar kerajinan tradisional tidak hanya bertahan secara budaya tetapi juga berkembang secara ekonomi, sekaligus memberikan kesejahteraan bagi komunitas.

Empowering (pemberdayaan)

Dalam aspek *empowering* menyatakan bahwa penguatan kapasitas masyarakat dapat dilakukan melalui pelatihan, bantuan alat, pengemasan, manajemen usaha, serta akses pasar dan modal. Upaya ini bertujuan agar masyarakat mampu meningkatkan kualitas dan nilai jual produk lokal secara mandiri. Namun di lapangan, pengrajin tenun di Desa Karae belum pernah mendapatkan pelatihan resmi mengenai desain, pengemasan, atau pemasaran digital. Sebagian besar masih menggunakan teknik lama yang diajarkan turun-temurun. Kegiatan produksi berjalan sendirisendiri tanpa dukungan koperasi atau kelompok usaha. Tidak ada dukungan modal dari pemerintah, sehingga pengrajin harus menggunakan dana pribadi untuk membeli bahan dan alat produksi. Meskipun beberapa pengrajin muda mulai mencoba menggabungkan motif tradisional dengan tren modern, namun upaya tersebut belum terarah secara maksimal karena minimnya pendampingan dan dukungan pasar.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa aspek *empowering* masyarakat dalam kegiatan menenun masih sangat terbatas. Meskipun secara teori pemberdayaan seharusnya mencakup pelatihan, bantuan alat, manajemen usaha, pengemasan, serta akses pasar dan modal untuk meningkatkan kualitas dan nilai jual produk lokal, kenyataannya para pengrajin belum mendapatkan pelatihan resmi terkait desain, pengemasan, maupun pemasaran digital.

Berikut ini adalah tabel rata-rata dari beberapa pengrajin kain tenun di desa Karae berdasarkan kapasitas produksi dan harga jual:

Nama pengrajin	Jumlah produksi perbulan (lembar)	Harga jual perlembar (Rp)	Total pendapatan perbulan (Rp)
Waintu	3	180.000	540.000
Dania	5	180.000	900.000
Sania	4	180.000	720.000
Ella	3	180.000	540.000
Nur	5	180.00	900.000

Sumber: Data diolah dari hasil penelitian

Penelitian Anda menunjukkan bahwa pengrajin di Desa Karae belum mendapatkan pelatihan resmi terhadap kapasitas teknis (desain, pengemasan), manajemen usaha, akses modal, maupun pemasaran sehingga praktik produksi dan pemasaran masih tradisional, individu, dan belum terorganisir. Hal ini sejalan dengan temuan lain bahwa pendidikan nonformal berbasis keterampilan terbukti meningkatkan kapasitas teknis pengrajin, memperluas akses terhadap sumber daya produksi, serta memperkuat partisipasi sosial dan ekonomi para perempuan pengrajin (Nurhayati., Salma., Triwinarti., 2025). Di lain pihak, studi pada kerajinan bambu di Sikulan Village memperlihatkan bagaimana pelatihan teknik tenun dan pemasaran digital (digital marketing) mampu menghasilkan kelompok usaha baru, meningkatkan kualitas produk, dan membuka peluang ekonomi sebuah model “empowering” konkret yang menunjukkan bahwa dengan intervensi sistematis, kerajinan tradisional bisa menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan, (Harris Effendi., D. Nurhaida., 2025)

Secara teoretis, pendekatan terhadap pemberdayaan kerajinan tradisional dapat dianalisis melalui paradigma Community Empowerment dan model kelembagaan. Pemberdayaan berarti penguatan kapasitas (*skills*), akses sumber daya, dan pasar adalah kunci agar masyarakat dapat mengelola dan mengembangkan potensi secara. Dalam konteks kerajinan, pendekatan ini menjadi relevan karena kerajinan tidak hanya aktivitas budaya,

tetapi juga ekonomi. Sebagai tambahan, teori jaringan bisnis dan inovasi dalam sektor kreatif menunjukkan bahwa jaringan usaha dan inovasi produk/strategi pemasaran memperbesar daya saing kerajinan kecil menengah. Misalnya, studi pada industri kerajinan di Indonesia menunjukkan bahwa kombinasi jaringan bisnis (networking) dan inovasi secara signifikan meningkatkan daya saing usaha kerajinan., (Harris Effendi., D. Nurhaida., 2025).

Pemberdayaan yang dilakukan tanpa pelatihan, dukungan kelembagaan, akses modal, dan pemasaran pemasaran modern, pengrajin di Desa Karae tetap pada praktik tradisional tidak akan berhasil. Studi kualitatif pada sentra kerajinan tenun di Desa Gamplong misalnya, menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan komunitas tenun sangat bergantung pada adanya inovasi, pengorganisasian pengrajin dalam kelompok atau paguyuban, serta dukungan kelembagaan untuk produksi dan pemasaran, (Putridiani & Suryono, 2019). Hal ini relevan dengan situasi di Desa Karae: potensi produk dan kreativitas (termasuk motif modern oleh pengrajin muda) sudah ada, tetapi tanpa struktur kelembagaan dan intervensi pemberdayaan potensi itu sulit untuk diaktualisasikan secara optimal. Oleh karena itu, untuk mengangkat kerajinan tenun dari skala rumah tangga ke skala usaha produktif dan berkelanjutan, diperlukan pelatihan sistematis, akses modal, pembentukan kelompok usaha atau koperasi, serta strategi pemasaran dan inovasi produk.

Protecting (Perlindungan)

Perlindungan terhadap karya lokal penting dilakukan melalui pengakuan hukum seperti hak kekayaan intelektual (HAKI), perlindungan desain, serta kebijakan afirmatif dari pemerintah untuk mendukung penggunaan produk lokal. Namun di Desa Karae, belum ada pengrajin yang mengetahui atau memiliki sertifikat hak cipta terhadap motif tenun yang mereka buat. Tidak ditemukan dokumen atau upaya dari pemerintah untuk mendorong pendaftaran HAKI atau branding produk lokal. Para pengrajin menyatakan belum pernah mendapat informasi tentang pentingnya perlindungan hukum atas hasil karya mereka. Akibatnya, produk tenun rawan ditiru oleh produsen besar tanpa memberikan keuntungan pada pengrajin lokal. Selain itu, produk tenun tradisional kalah bersaing dengan tekstil pabrikan yang lebih murah dan lebih praktis digunakan. Pemerintah belum menunjukkan peran aktif dalam melindungi dan mengangkat nilai ekonomi kain tenun sebagai warisan budaya yang berharga.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengrajin tenun di Desa Karae belum memiliki pemahaman maupun sertifikat hak kekayaan intelektual (HAKI) atas motif tenun yang mereka buat, sehingga produk mereka rawan ditiru oleh produsen besar dan kalah bersaing dengan tekstil pabrikan. Kondisi ini sejalan dengan temuan lain, di mana banyak motif tenun kontemporer belum didaftarkan sehingga sulit dilindungi jika terjadi sengketa (Nurhayati., Salma., Triwinarti., 2025). Penelitian Anda menemukan bahwa pengrajin di Desa Karae tidak mengetahui atau memiliki sertifikat hak kekayaan intelektual atas motif tenun mereka; tidak ada pendataan, pendaftaran HAKI, maupun intervensi kelembagaan dari pemerintah sehingga tenun mereka rentan ditiru dan produk tradisional kalah bersaing dengan tekstil pabrikan.

Hasil ini konsisten dengan kondisi umum yang diidentifikasi dalam penelitian terhadap kain tradisional di Indonesia. penelitian pada kain Tapis Lampung menunjukkan bahwa meskipun Tapis memiliki nilai sejarah, budaya, dan estetika tinggi, perlindungan melalui mekanisme HAKI atau kekayaan intelektual komunal (communal IPR) jarang diberlakukan sehingga Tapis rawan klaim dari pihak luar jika tidak ada dokumentasi atau pendaftaran resmi, (Putri & Putri, 2022). Penelitian lain bahwa tanpa pendekatan hukum yang menggabungkan perlindungan IPR dan pemberdayaan komunal, songket tradisional menghadapi ancaman pembajakan motif dan male-exploitation komersial, yang melemahkan nilai budaya dan ekonomi pengrajin, (Aryanti & Herman, 2025).

Dengan demikian, kekosongan peran negara atau pemerintah dalam mendampingi pengrajin Desa Karae untuk mendaftarkan motif tenun sebagai kekayaan intelektual komunal serta minimnya pemahaman pengrajin tentang aspek hukum berarti potensi budaya dan ekonomi tenun tradisional tersebut tidak dilindungi secara hukum dan sangat rentan terhadap eksploitasi. Ini menegaskan pentingnya intervensi sistematis: registrasi communal IPR, pendataan ekspresi budaya tradisional, sosialisasi HAKI kepada pengrajin, serta kebijakan afirmatif pemerintah agar motif tenun tidak hanya dilestarikan sebagai warisan budaya, tetapi juga diakui sebagai aset ekonomi berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pemberdayaan pengrajin tenun di Desa Karae belum optimal karena lingkungan pendukung masih terbatas, kapasitas pengrajin dalam manajemen dan pemasaran belum memadai, serta perlindungan terhadap produk lokal belum tersedia. Ketiga aspek *enabling*, *empowering*, dan *protecting* belum berjalan sinergis, sehingga pengembangan usaha tenun dan daya saing produk masih terhambat. Upaya pemberdayaan perlu diarahkan pada penguatan lingkungan, peningkatan kapasitas, dan perlindungan hukum agar industri tenun dapat berkembang lebih berkelanjutan.

Rekomendasi Pemberdayaan pengrajin tenun di Desa Karae perlu diperkuat melalui penyediaan fasilitas produksi, pelatihan rutin, dan dukungan infrastruktur usaha untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas pengrajin melalui pelatihan manajemen, inovasi desain, pemasaran digital, serta memberikan akses permodalan yang lebih mudah. Selain itu, perlindungan hukum terhadap produk tenun lokal harus segera diwujudkan melalui fasilitasi pendaftaran HKI dan kebijakan afirmatif yang berpihak pada pengrajin, termasuk promosi produk lokal dan pengendalian persaingan dengan tekstil pabrikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media Press
- Afriansyah. (2023). Pengertian dan Konsep Pemberdayaan Masyarakat. In *Pemberdayaan Masyarakat*.
- Aryanti, M., & Herman, K. M. S. (2025). *Intellectual Property Rights (IPR) Protection of Palembang Songket Weaving as Traditional Cultural Heritage in Indonesia*. 3(2).
- Alaslan, A. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: Rajawali Press.
- Chambers, R. (2014). *Rural Development: Putting the last first*. Taylor & Francis. <https://books.google.co.id/books?id=zLeOAwAAQBAJ>
- Didi, L. (2018). Community Participation In Coral Reef Conservation Through Coral Reef Rehabilitation And Management Program In The Village Of Bahari South Buton Regency. *International Journal of Management and Administrative Sciences (IJMAS)*, 5(07), 1–8.
- Didi La. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat Pengrajin Kuningan dan Perak di Kelurahan Melai Kecamatan Murhum Kota Baubau*.
- Hasanah, H. (2016). Teknik-teknik Observasi. *Jurnal at-Taqaddum*, 8(1), 21-46.
- Ife, J. (2013). *Community Development in an Uncertain World*. Cambridge University Press. <https://books.google.co.id/books?id=fZmyAAAAQBAJ>
- Jannah, L. I., Zusmelia, Z., & Irwan, I. (2024). *Role of Social Capital in Creative Economy Development in the Craft Sub-Sector in the Tourism Destination Area of Sawahlunto City , West Sumatra Province*. 2, 231–242. <https://doi.org/10.26618/jed.v>
- Mardikanto, T. (2012). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Alfabeta. <https://books.google.co.id/books?id=IAA4nwEACAAJ>
- Muhtadi, S. &. (2021). Community Economic Empowerment through Creative Economic Program in a Business Cooperative in Setu District , Tangerang Selatan. *Prosperity: Journal of Society and Empowerment*, 1(2), 81–93. <https://doi.org/10.21580/prosperity.2021.1.2.8221>
- Nurhayati., Salma., Triwinarti., & S. (2025). Skills-Based Non-Formal Education In Women ' S Empowerment : A Case Study Of The Samarinda Weaving. *Sosioedukasi*, 14(3), 2001–2013.
- Putri, Y. M., & Putri, R. W. (2022). *Protection of Traditional Cloth Tapis Lampung in Communal Intellectual Property Rights Regime*. 14(November), 1–25.
- Putridiani, S. A., & Suryono, Y. (2019). *Pemberdayaan pengrajin tenun*. 6(2), 161–169.
- Putra, A. Y. (2022). *Pemberdayaan Perempuan Pengrajin Tenun Melalui Usaha Tenun Siak Bu Atun Mekar Permai di Kampung Rempah Kec. Siak Kab*.
- Saleh, S. (2017). Analisis Data Kualitatif. *Pustaka Ramadhan*, 1, 180.
- Samparadja, N., Jayadi, K. & Satriadi. (2022). Studi Terhadap Kain Tenun Buton (Proses, Makna Motif dan Penggunaannya). *Jurnal Seni Rupa dan Desain*.

Siak. Riau: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

Silvana. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Kerajinan Tenun dalam Meningkatkan Usaha Pendapatan di Desa Loli Tasiburi Kec. Banawa Kab. Donggala*. Palu: Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah.

Yue, X., Li, Y., & Zhou, L. (2023). *The Impact of Empowerment Practice on the Rural Collective Economy : Empirical Evidence from Rural Communities*.

Zimmerman, M. (2000). Empowerment theory: Psychological, organizational and community levels of analysis. *Handbook of Community Psychology*, 43–64.